

BAB I

PENDAHULUAN

Program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan pemerintah dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 bertujuan untuk memperbaiki gizi anak sekolah, menurunkan angka stunting, dan meningkatkan kualitas SDM sejak usia dini. Program ini mencakup pemberian makanan bergizi kepada siswa sekolah dasar dan menengah, serta dukungan nutrisi bagi ibu hamil dan balita.[1] Namun, anggaran yang disiapkan, yaitu sekitar Rp100 triliun per tahun, menimbulkan kekhawatiran dari berbagai pihak mengenai keberlanjutannya dalam jangka panjang.[2] Tantangan distribusi, pengawasan kualitas gizi, dan potensi pemborosan juga menjadi masalah yang krusial. Opini masyarakat terhadap kebijakan ini sangat beragam, terutama di media sosial seperti Twitter yang kini dikenal sebagai platform X. Media sosial menjadi ruang diskusi publik yang kuat, sehingga memahami persepsi masyarakat secara data-driven sangat penting untuk pengambilan kebijakan berbasis bukti.[3] Oleh sebab itu, analisis sentimen dapat digunakan untuk menilai respons masyarakat secara sistematis dan objektif.

Sejak diumumkan sebagai program unggulan pemerintah, wacana Program Makan Bergizi Gratis telah menjadi topik hangat di berbagai kanal digital, khususnya media sosial seperti X (Twitter). Banyak pengguna mengekspresikan antusiasme terhadap potensi perbaikan gizi dan kesetaraan akses pangan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.[4] Namun, tidak sedikit pula yang menyuarakan kekhawatiran tentang ketidaksiapan infrastruktur, dugaan potensi korupsi, dan kekhawatiran efisiensi anggaran negara. Tagar seperti #MakanGratis, #100Triliun, dan #AnggaranNegara sempat menjadi trending topic, mencerminkan betapa besar perhatian publik terhadap kebijakan ini.[3] Bahkan menurut laporan analitik dari Drone Emprit (2024), volume percakapan terkait program ini meningkat lebih dari 250% setelah diumumkan secara resmi dalam kampanye presiden terpilih. Fenomena ini menunjukkan pentingnya mendengarkan suara publik melalui media sosial sebagai bentuk partisipasi demokratis. Oleh karena itu, pendekatan berbasis

data untuk menangkap persepsi publik secara akurat menjadi semakin penting dan relevan dalam evaluasi kebijakan publik.[5]

Beberapa studi telah mengkaji opini publik terhadap kebijakan pemerintah menggunakan teknik analisis sentimen berbasis machine learning. Penelitian oleh Putri menunjukkan bahwa Naïve Bayes mampu mengklasifikasikan opini pengguna Twitter tentang kebijakan publik dengan akurasi tinggi. [6] Huda et al. membandingkan performa Naïve Bayes, VADER, dan TextBlob, dan menemukan bahwa TextBlob cukup akurat dalam mengklasifikasi opini sederhana, namun belum kuat untuk menangani konteks kompleks. [7] Meskipun demikian, pendekatan TextBlob berbasis leksikon tetap relevan karena ringan, tidak memerlukan pelatihan data, dan mudah diimplementasikan.[8] Sayangnya, belum ada penelitian yang secara khusus menerapkan TextBlob pada kebijakan nasional berskala besar seperti Program Makan Bergizi Gratis. Gap ini menunjukkan adanya kekosongan kajian ilmiah dalam eksplorasi metode NLP ringan dan efisien dalam konteks sosial-politik Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis sentimen masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis menggunakan TextBlob. Selain itu, akan dilakukan perbandingan performa metode TextBlob dengan algoritma Naïve Bayes dan C4.5 dalam hal akurasi klasifikasi sentimen. Penelitian sebelumnya oleh Sutranggono & Imah menunjukkan bahwa model supervised seperti SVM atau Random Forest efektif, namun memerlukan proses pelatihan data dan tuning parameter yang kompleks.[9] Oleh karena itu, pendekatan berbasis leksikon seperti TextBlob dapat menjadi solusi efisien untuk analisis awal opini kebijakan.[10] Penelitian ini juga akan menampilkan word cloud dari masing-masing kategori sentimen untuk mengidentifikasi kata kunci dominan dalam diskusi masyarakat. Secara akademik, hasil studi ini diharapkan menjadi kontribusi dalam pengembangan NLP leksikal dalam konteks kebijakan sosial Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan model analisis yang dapat direplikasi untuk kebijakan publik lainnya.